

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK MELALUI PELATIHAN VOKASIONAL PADA PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Dinah Pangestuti

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Kementerian Sosial

Email: dina.experial@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan vokasional. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan vokasional dan ketergantungan dengan orang lain. Secara mikro, kondisi ini akan menjadi beban bagi keluarga dan secara makro akan menjadi beban bagi masyarakat karena penyandang disabilitas tidak produktif. Terlebih lagi umumnya penyandang disabilitas fisik masih berada pada usia produktif, sehingga perlu diarahkan, dibina, diberdayakan dan diberi kesempatan untuk menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki. Metode evaluasi program pelatihan terhadap program yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan vokasional, menemukan faktor pendukung dan penghambat, serta mengetahui solusi yang dilakukan lembaga. Informan ditentukan secara purposive, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data yang dikumpulkan melalui pemanfaatan dokumen yang terkait dengan pemberdayaan serta data yang terkumpul tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi. Adapun rumusan permasalahannya adalah bagaimana program tersebut diimplementasikan agar dapat memberikan informasi yang berguna yang mengarah pada pencapaian tujuan program. Outputnya terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas fisik. Artikel ini menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses mengembangkan penyandang disabilitas fisik berdasarkan keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya, yang merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengentaskan penyandang disabilitas yaitu melalui pelatihan vokasional.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas Fisik, Pelatihan, Pemberdayaan.

Abstract

This article describes empowering persons with physical disabilities through vocational training. The main problems faced are low vocational skills and dependence on other people. On the micro level, this condition will be a burden on the family and at the macro level will be a burden on the community because persons with disabilities are not productive. Moreover, generally persons with physical disabilities are still at a productive age, so they need to be directed, fostered, empowered and given the opportunity to develop their potential. The training program evaluation method for ongoing programs with the aim of describing the implementation process of empowering persons with physical disabilities through vocational training, finding supporting and inhibiting factors, and finding out the solutions made by the institution. Informants were determined purposively, data collection was done by interviewing and data collected through the use of documents related to empowerment and the collected data were analyzed qualitatively with triangulation techniques. The formulation of the problem is how the program is implemented in order to provide useful information that leads to the achievement of program objectives. The output is realized independence and welfare of persons with physical disabilities. This article shows that empowerment is a process of developing people with physical disabilities based on their lack of power or power, which is one way that can be used to alleviate persons with disabilities, namely through vocational training.

Keywords: Physically Disabled; Training; Empowerment.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari penduduk Indonesia memiliki peran, hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dengan masyarakat Indonesia yang lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sesuai dengan kemampuannya, dan berhak pula untuk menikmati hasil pembangunan. Keikutsertaan dalam proses pembangunan merupakan hal yang normal, karena masih mempunyai kemampuan yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah sudah menempatkan penyandang disabilitas pada peran dan hak yang sama dengan penduduk negeri Indonesia yang lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang no 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

Penggolongan penyandang disabilitas kelainan gerak yaitu Spastik (*Spasticity*), Dysikenisia, Ataxia, dan jenis campuran (*mixed*) (Asjari, 1995). Penggolongan ini dapat mendatangkan permasalahan tertentu terutama yang berhubungan dengan mobilitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup (Peter & Colerige, 1997), sedangkan Jika dilihat dari tingkat disabilitasnya, sebagian besar disabilitas ringan dan sedang, yaitu penyandang disabilitas fisik yang masih mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari sendiri dan tidak sepenuhnya atau tidak memerlukan pertolongan orang lain, juga masih bisa diberdayakan/direhabilitasi. Masalah umur penyandang masalah yang menerima pelayanan yang berusia remaja (antara 12-16 tahun) ternyata lebih kecil dibanding yang berusia dewasa (17-35 tahun) yang merupakan usia produktif.

Penyandang disabilitas fisik merupakan sumber daya insani yang seharusnya dimanfaatkan dalam pembangunan agar jumlah yang demikian besar tidak menjadi beban pembangunan. Terlebih lagi umumnya penyandang disabilitas fisik masih berada pada usia produktif, sehingga perlu diarahkan, dibina, diberdayakan dan diberi kesempatan untuk menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 (pasal 1), Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spirituil dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini menegaskan hak warga negara termasuk penyandang disabilitas untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial, termasuk masalah disabilitas merupakan masalah yang kompleks dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, maka memerlukan penanganan khusus, terpadu, berkesinambungan dan tuntas, yaitu melalui program pelayanan rehabilitasi sosial.

Adapun tujuan yang ingin dicapai seperti menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 (Pasal 3), tentang *Penyandang Disabilitas* yang arah penekanannya dalam penanganan masalah disabilitas khususnya disabilitas fisik adalah pulihnya harga diri dan kemampuan penyandang disabilitas fisik agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penekanan ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik adalah rendahnya kemampuan vokasional serta ketergantungan pada orang lain terlebih lagi umumnya penyandang disabilitas fisik masih berada pada usia produktif. Rendahnya kemampuan dan ketergantungan pada orang lain sering juga disebut sebagai ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan pada diri seseorang akan berakibat berkurang atau hilangnya hak yang seharusnya dimiliki, hilangnya kemampuan dan keberanian untuk menyampaikan aspirasi apalagi menuntut hak, hilangnya kemampuan untuk mencapai akses terhadap sumber kesejahteraan sosial dan hilangnya peran serta fungsi sosial.

Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah dengan melakukan pemberdayaan (*empowering*) terhadap penyandang disabilitas fisik. Melalui upaya ini diharapkan penyandang masalah akan menjadi individu yang mandiri, berdaya guna dan berhasil guna. Pemberdayaan ini perlu berdasarkan pada prinsip dan asumsi proses pemberdayaan (Dubois Brenda & Miley Carla Kongsrud, n.d.). Salah satu strategi dalam proses pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran (Jim. Ife, 1995). Hal ini dimaksudkan untuk membekali penyandang disabilitas fisik dengan pengetahuan dan keterampilan kerja, nantinya akan memenuhi tuntutan pasaran tenaga kerja, memperoleh lapangan pekerjaan dan penghasilan.

Sebagai dampak dari ketidakberdayaan, penyandang disabilitas fisik kurang mampu bersaing untuk memperoleh sumber-sumber kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara mikro, kondisi ini akan menjadi beban bagi keluarga; namun secara makro akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara karena penyandang disabilitas tidak produktif.

Berbagai upaya pemerintah ditujukan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan memfasilitasi penempatan penyandang disabilitas fisik ke dalam lapangan pekerjaan yang terbatas, karena disesuaikan dengan jenis, derajat kecacatan dan keterampilan yang di tekuni melalui sistem (cara): *open employment* (bekerja di perusahaan), *self employment* (bekerja usaha mandiri), *group* (kelompok) KUBE / koperasi dan *sheltered employment* (bekerja kelompok secara bebas) program pelayanan ini berusaha memberikan peluang serta mengajak penyandang disabilitas

untuk berfikir kritis dan memahami kondisi kehidupannya guna membuat pilihan-pilihan bagi masa depannya.

Pemberdayaan adalah mengembangkan klien (individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas) dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya (Adi, 2003). Bagi penyandang disabilitas fisik, program pemberdayaan ini lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan kerja. Melalui program ini diharapkan agar penyandang disabilitas fisik nantinya akan mampu memperoleh pekerjaan dan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya

Pelatihan kerja ini dimaksudkan untuk membekali penyandang disabilitas fisik dengan pengetahuan dan keterampilan kerja, nantinya akan memenuhi tuntutan pasaran tenaga kerja, memperoleh lapangan pekerjaan dan penghasilan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mendatangkan manfaat bagi peserta pelatihan, karena hanya sebagian kecil, yaitu 26 orang atau 18,6% yang telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan (*open employment*) dan yang telah memulai usaha secara mandiri atau berwiraswasta (*self employment*) sebanyak 118 orang atau 81,94% dari keterampilan kerja yang di peroleh selama satu tahun anggaran (Prof. Dr. Soeharso, 2016).

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat evaluatif program pelatihan yang dilakukan melalui survei lapangan, dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi tentang obyek evaluasi dan temuan-temuan evaluasi, sehingga penerima laporan akan siap memahami apa yang terjadi, dapat mengakses temuan-temuan untuk mencapai kredibilitas maksimum, memanfaatkan informasi yang diperoleh, kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Menurut Suparman adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang program diklat.

Artikel ini menggambarkan kenyataan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan vokasional, faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang telah dilakukan lembaga, agar gambaran yang dihasilkan akan lebih spesifik dan mendetail, maka menggunakan metode deskriptif, yaitu deskripsi terhadap program yang sedang berjalan mulai dari tahap pendekatan awal sampai dengan terminasi untuk menghasilkan deskripsi apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan lembaga.

Artikel ini ingin mendapatkan informasi dari para informan lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Potret ini merupakan studi

kasus pelaksanaan pemberdayaan yang dapat diteliti sebagai suatu obyek penelitian, sebagai akibatnya diperoleh gambaran proses aplikasi program dalam memberdayakan penyandang disabilitas fisik pada BBRSPDF “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta.

Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield, n.d.). Dalam artikel ini, sampel diambil secara *purposive*, yaitu dalam menggali informasi langsung dengan sengaja menentukan informan yang akan menjadi subyek penelitian.

Menjelaskan “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi” (Moleong, 2001). Dalam artikel data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, wawancara mendalam dan pengamatan. Penelitian ini hanya observasi parsial yaitu hanya melibatkan pada sebagian kegiatan subjek penelitian karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan observasi secara penuh meskipun tetap berusaha mengamati secara keseluruhan (Paton, 1987).

Dalam artikel ini, proses analisa data dimulai dari peristiwa-peristiwa sosial yang ditemukan dalam kajian di lapangan (Lawrence, 1997) yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara mendalam, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen yang diperoleh selama penelitian dengan melalui pendekatan kualitatif dengan model induktif. Dengan cara data yang telah terkumpul ditelaah, lalu direduksi dengan membuat abstraksi. Pengabstraksian ini dimaksudkan untuk lebih ringkas dan menyederhanakan data tanpa mengurangi arti data secara keseluruhan. Setelah itu dilakukan penyajian data, yaitu pengungkapan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Untuk meningkatkan obyektivitas dan keabsahan data serta untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, maka menggunakan teknik **triangulasi**. Triangulasi merupakan proses menemukan kesimpulan dengan mengadakan *chek* dan *recek* dari berbagai sudut, yaitu dilakukan *cross chek* (konfirmasi data) dengan berbagai elemen yang dapat dijadikan sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan vokasional pada program rehabilitasi sosial sebagai berikut:

Pelaksanaan Identifikasi

Identifikasi adalah kegiatan pendataan terperinci tentang latar belakang permasalahan

sosial, ekonomi, fisik dan pendidikan, serta untuk penetapan calon penerima pelayanan (BBRSBD Prof. Dr. Soeharso, 2016). Pelaksanaan identifikasi yang dilakukan meliputi kegiatan untuk penerima manfaat reguler tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1
Keadaan Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Fisik Tahun 2016

NO	URAIAN KEGIATAN	L	P	JML
1	Jumlah penyandang disabilitas fisik tahun 2015 yang belum lulus, masih disantun tahun 2016	67	16	83
2	Pemasukan selama tahun 2016	132	43	175
3	Jumlah penyandang disabilitas fisik tahun 2016	199	59	258
4	Penyandang disabilitas fisik dipulangkan ke keluarga dan meninggal dunia selama tahun 2016	19	4	23
5	Penyandang disabilitas fisik 2016 telah selesai rehabilitasi (Angkatan I =68 orang, Angkatan II=76 orang)	112	32	144
6	Keadaan penyandang disabilitas fisik sampai akhir Desember 2016	68	23	91

Sumber: Laporan Kegiatan BBRSPDF "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta, 2016

Pelaksanaan Rekrutmen

Dalam proses rekrutmen terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk membuat proses rekrutmen tersebut jadi lebih efisien. Semacam yang tercantum dalam SPR (Standar Pelayanan Rehabilitasi (BPRSBD Prof. Dr. Soeharso, 2007), yaitu Pertama, calon penerima manfaat mengirim blanko pendaftaran, kedua, *checking* kelengkapan blanko pendaftaran, ketiga, pemberitahuan untuk melengkapi blanko, keempat, seleksi administrasi melalui blanko pendaftaran oleh 'social worker', psikolog, 'dormitory officer', 'chief-instructure', 'medical officer', 'rehabilitation officer'. Kelima, pemanggilan bagi yang lolos seleksi melalui surat oleh Kabalai, dan pemberitahuan melalui surat bagi yang tidak lolos seleksi ke daerah.

Pelaksanaan Asesmen

Petugas assesmen dalam memberikan bimbingan vokasional dengan menggunakan metode "The Seven Points Plan" yang terdiri dari: a. Kemampuan fisik (*physical capacity*). b. penilaian medis (*medical rating*). c. tingkat intelegensi (IQ). d. Bakat (*special abtitude*). e. minat (*Interest*). f.

watak kepribadian (*disposition and temperament quality*). g. faktor lain yang ada kaitannya dengan keadaan yang memungkinkan seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang sosial ekonomi dan budaya, pasaran kerja dan sebagainya (*other relevan circumstances*).

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan assesmen tahun 2016 diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Asesmen Fisik
Activity of Daily Leaving (ADL)

No.	KATEGORI	L	P	JML	KET
1.	Mudah	64	20	84	0,48%
2.	Dapat	68	23	91	0,52%
3.	Tidak dapat	-	-	-	-
	Jumlah	132	43	175	100%

Sumber: Laporan Kegiatan BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2016

Tabel 3
Test Intelegensi

No	KATEGORI	L	P	JML	KET.
1.	Law Average	30	11	41	23,42%
2.	Averager	67	23	90	51,43%
3.	High Averager	35	9	44	25,15%
	Jumlah	132	43	175	100%

Sumber: Laporan Kegiatan BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2016

Kegiatan vokasional assesmen dimaksudkan untuk mengetahui dan mengembangkan potensi yang ada pada diri penyandang disabilitas fisik dalam rangka memilih keterampilan dengan mencobakan beberapa keterampilan yang diminati. Melalui vokasional assesmen diharapkan penyandang disabilitas fisik bisa bersikap obyektif, realistis dan rasional dalam memilih hak keterampilan. Asesmen vokasional diikuti oleh 175 orang penerima manfaat penyandang diasabilitas fisik. Hasil assesmen dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Asesmen Vocational Tahun 2016

NO	JENIS WORK SAMPEL	L	P	JML
1	Penjahitan	15	14	29
2	Komputer	11	1	12
3	Fotografi	13	2	15
4	Percetakan	14	-	14

NO	JENIS WORK SAMPEL	L	P	JML
5	Elektro	8	-	8
6	Salon Kecantikan	2	-	2
7	Rep. Sepeda Motor	20	-	20
8	Pertukangan Kayu	15	-	15
9	Handycraf	17	11	28
10	Bordir	-	10	10
11	Tata Boga	4	4	8
12	Las	7	7	14
	Jumlah	126	49	175

Sumber: Laporan Kegiatan BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2016

Untuk menilai aspek vokasional lembaga ini tidak lagi menggunakan GVAT sebagai alat ukur dalam mengukur kapasitas vokasionalnya, namun dalam pelaksanaannya langsung dilakukan penilaian melalui *work sample*. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses assesmen mengingat keterbatasan petugas assesmen, namun disisi lain petugas menitipkan ke petugas bimbingan keterampilan yang tentunya akan merepotkan tugas pokok petugas, sehingga peralatan tersebut tidak memiliki fungsi yang dominan dalam proses penilaian terhadap kemampuan vokasional seorang penyandang disabilitas.

Work sample merupakan salah satu metode assesmen yang cukup akurat dalam menilai potensi penerima manfaat yang merupakan andalan lembaga ini untuk melakukan evaluasi vokasional sehingga peranan *work sample* sangat penting dalam penentuan kapasitas vokasional. Namun dengan adanya keterbatasan peralatan *work sample* seperti terlihat pada tabel di atas sebagian besar penilaian melalui contoh kerja dititipkan pada seksi bimbingan keterampilan, hal demikian tentu akan mengganggu proses bimbingan keterampilan bagi penerima manfaat.

Tabel 5
Kondisi Petugas Assesmen

NO	PENDIDIKAN	JML	DIKLAT ASSES-MEN	KET
1	S1 Psikologi Klinis	1	-	
2	D3 Occupational Therapy	1	-	
3	D4 Kesejahteraan Sosial	2	2	
4	S1 Bimbingan Konseling	1	-	

Sumber: Laporan Kegiatan BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2016

Tabel di atas tampak hanya ada dua petugas yang memperoleh pelatihan khusus assesmen, yang akan menghadapi kendala dan permasalahan di lapangan, sehingga dalam melakukan assesmen kepada calon penerima manfaat kurang optimal karena petugas hanya akan bekerja terbatas pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki saja dan hasilnya kurang maksimal. Sementara petugas assesmen memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam proses awal rehabilitasi penyandang disabilitas fisik, karena petugas ini memiliki posisi yang sangat menentukan terhadap seorang penerima manfaat dalam mengikuti tahapan rehabilitasi selanjutnya. Bila terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan akan berakibat merugikan penerima manfaat.

Pelaksanaan Pelatihan Vokasional

Pelatihan vokasional atau bimbingan keterampilan kerja diberikan dalam rangka memberikan satu jenis keterampilan sesuai bakat, minat dan kemampuan sebagai bekal memasuki kehidupan mandiri di masyarakat. Adapun jenis keterampilannya adalah elektronik, penjahitan, reparasi sepeda motor, fotografi, salon kecantikan, pertukangan kayu, percetakan, sablon dan *handycraft*. Jumlah yang mengikuti bimbingan keterampilan kerja pada tahun 2016 dalam dua angkatan sebanyak 258 orang, yang pulang sebelum masuk vak 4 orang, pulang setelah masuk vak 19 orang, pulang selesai rehabilitasi 144 orang (Angkatan I = 68 orang, II = 76 orang) jadi penerima manfaat yang belum selesai rehabilitasi tahun 2016 sebanyak 91 orang.

Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan Kerja

Pelaksanaan bimbingan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas fisik sebagaimana kurikulum bimbingan keterampilan dengan materi 30% teori dan 70% praktek atau 1.200 jam latihan (± 8 bulan) dengan harapan dapat memahami dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan sesuai keahliannya.

Pelaksanaan Penyaluran

Dalam penyaluran kerja, dilaksanakan kegiatan bimbingan kesiapan keluarga oleh seksi penyaluran bekerjasama dengan pejabat fungsional pekerja sosial dan pengampu penerima manfaat. Kegiatan ini merupakan pertanggungjawaban pekerja sosial kepada orang tua atau wali penerima manfaat melalui testimoni dari eks penerima manfaat yang telah mempunyai usaha mandiri dan pengalaman nyata serta perjuangan menuju sukses.

Bimbingan lanjut merupakan proses peningkatan dan pematapan kualitas kemampuan fisik, mental, sosial dan vokasional eks penerima manfaat melalui bimbingan peningkatan hidup bermasyarakat, pengembangan usaha kerja, bimbingan peningkatan usaha kerja serta terminasi, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dengan bimbingan lanjut dapat diketahui perkembangan eks penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel 6
Perkembangan Eks Penerima Manfaat

No	Penyaluran	Jumlah
1	Telah bekerja di perusahaan (<i>Open Employment</i>)	22 orang
2	Telah memulai usaha secara mandiri (<i>Self Employment</i>)	29 orang
3	Bekerja secara terlindung (<i>Sheltered Employment</i>)	-
4	Belum bekerja / Stagnan	16 orang
5	Alih profesi	13 orang

Sumber: Laporan Kegiatan BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta Tahun 2016

Bimbingan pematapan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mempersiapkan diri memperoleh kesempatan kerja bagi eks penerima manfaat. Dengan pematapan keterampilan eks penerima manfaat diharapkan mampu bersaing dan menghasilkan produk atau jasa yang mendapat pengakuan masyarakat secara luas dan laku di pasaran. Setelah selesai mengikuti bimbingan pematapan keterampilan mendapatkan paket bantuan berupa barang yang disesuaikan dengan jenis keterampilan pematapan, guna meningkatkan usaha mandiri eks penerima manfaat.

Faktor Pendukung dan Penghambat serta Solusi Lembaga

Beberapa yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan vokasional, antara lain:

- Proses pelaksanaan rekrutmen menjadi lebih efektif karena terdapat serangkaian aktivitas diantaranya Pertama, calon penerima manfaat mengirim blanko registasi, kedua, *checking* kelengkapan blanko registasi, ketiga, pemberitahuan untuk melengkapi blanko, keempat, seleksi administrasi melalui blanko registasi oleh 'social worker', psikolog, 'dormitory officer', 'chief-instructure', 'medical officer', 'rehabilitation officer'. Kelima, pemanggilan untuk yang lolos seleksi melalui surat oleh Kabalai, dan pemberitahuan

melalui surat bagi yang tidak lolos seleksi ke daerah.

- Petugas assesmen dalam memberikan bimbingan dan konseling vokasional kepada penerima manfaat menggunakan metode "*The Seven Points Plan*" (7 kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka memilih jenis keterampilan, sehingga apa yang telah diputuskan tepat sasaran) yang terdiri dari : a. Kemampuan fisik (*physical capacity*), b. Penilaian medis (*medical rating*), c. Tingkat intelegensi (*IQ*), d. Bakat (*special abtitude*), e. Minat (*Interest*), f. Watak kepribadian (*disposition and temperamen quality*), g. Faktor lain yang ada kaitannya dengan keadaan yang memungkinkan seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang sosial ekonomi dan budaya, pasaran kerja dan sebagainya (*other relevan circumstances*), sehingga proses pelaksanaan assesmen yang diselenggarakan lembaga secara kesisteman telah berjalan dengan baik dengan menilai aspek fisiologis, psikologis, sosiologis dan vokasional.
- Case conference* merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan. *Case conference* beranggotakan dari para ahli di bidang rehabilitasi penyandang disabilitas fisik dan dipimpin oleh kepala balai sebagai Ahli Rehabilitasi (*Rehabilitation Officer*) dibantu oleh kepala bidang rehabilitasi sosial dan kepala bidang penyaluran dan bimbingan lanjut sebagai asisten ahli rehabilitasi (*Asistant Rehabilitation Officer*)
- Peralatan dan sarana prasarana selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang ada. Kegiatan materi praktek di masing-masing vak keterampilan, dialokasikan bahan praktek sesuai dengan materi yang diajarkan pembimbing di setiap keterampilan.
- Dengan Praktek Belajar Kerja penerima manfaat dapat beradaptasi terhadap lingkungan kerja serta memperoleh gambaran riil tentang cara-cara membuat produksi dan memasarkan hasil produksi.
- Setelah Praktek Belajar Kerja selesai beberapa penerima manfaat dapat diterima sebagai karyawan sebanyak 34 penyandang disabilitas fisik pada 19 perusahaan/home industri.
- Penyaluran eks penerima manfaat dapat bekerja di perusahaan (*Open Employment*), memulai usaha secara mandiri (*Self Employment*), bekerja secara terlindung (*Sheltered Employment*), belum bekerja/stagnan dan alih profesi.

Beberapa faktor penghambat dan solusi lembaga yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik, sebagai berikut:

- a. Kuantitas pegawai belum didukung dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga beban kerja dan jumlah sumber daya manusia kurang seimbang.
- b. Usia pegawai rata-rata diatas 40 tahun sehingga untuk mendukung kompetensi kerja masih diperlukan peningkatan kemampuan atau *capability* SDM, hal tersebut menyebabkan beban kerja dan jumlah SDM kurang seimbang.
- c. Data pada wilayah yang kurang akurat. Untuk mengatasinya, petugas mengadakan pendataan seleksi dan motivasi, serta koordinasi ke wilayah. Kedua, tidak relanya *family* melepas orang menggunakan disabilitas yang disebabkan *over-protection*. Untuk mengatasi petugas memberikan motivasi & warta acara UPT.
- d. Tidak terdapat kemampuan orang dengan kedisabilitasan membiayai transpot untuk tiba ke UPT. Cara mengatasi dengan meminta dukungan pemerintah daerah.
- e. Dengan waktu magang yang pendek hanya 1 bulan memang ada yang secara teknis keterampilan sudah bisa, namun mental masih kurang siap untuk terjun dalam lapangan pekerjaan yang sebenarnya. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga belum bisa mengusahakan perpanjangan waktu magang karena ditentukan oleh kesediaan perusahaan menerima penerima manfaat untuk magang.
- f. Kegiatan bimbingan kewirausahaan belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya, karena berlangsung hanya 10 hari, sehingga masih dirasakan kurang untuk mengetahui cara memasarkan hasil produksi, menciptakan usaha sendiri dan pengetahuan tentang pemasaran. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga belum bisa mengatasinya karena terkait dengan keterbatasan waktu pelaksanaan program

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Pelatihan Vokasional merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yaitu: pelaksanaan rekrutmen, pelaksanaan assesmen, pelaksanaan pelatihan vokasional dan penyaluran.

Proses pelaksanaan rekrutmen terdapat 5 rangkaian kegiatan. Pelaksanaan rekrutmen sebagai

pintu gerbang awal proses rehabilitasi, sampai saat ini ditemui adanya kondisi penerima manfaat yaitu terpenuhinya target sebanyak 155 penerima layanan di tahun 2016, tetapi hanya 152 orang (98,06%) secara output target pelayanan dalam lembaga tercapai karena terjadi pergeseran jumlah penerima manfaat akibat adanya anak ijin lama, meninggal dunia, pelanggaran terhadap aturan & dilarang pelayanannya & lain-lain. Proses rekrutmen amat penting buat diperhatikan oleh forum pemberi layanan menggunakan pedoman dalam paradigma rekrutmen "*Human Original*"

Terdapat evaluasi terhadap proses pelaksanaan rekrutmen, bahwa sebagian besar penerima manfaat memberikan penilaian positif terhadap proses pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Selain itu adanya dukungan pada penerima manfaat baik dari keluarga juga pemerintah daerah setempat.

Lembaga sudah memiliki buku petunjuk teknis pelaksanaan assesmen, yang dapat memaksimalkan dan mengarahkan dalam pengambilan keputusan terhadap individual penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang tepat dan tuntas.

Karena assesmen merupakan proses yang berkelanjutan artinya assesmen dilakukan tidak hanya di awal proses pemberian pelayanan saja tetapi juga dilakukan di saat proses sedang berlangsung dan di akhir proses pemberian pelayanan.

Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas serta mempersiapkan diri memperoleh kesempatan kerja, yang nantinya mampu bersaing dan menghasilkan produk atau jasa yang mendapat pengakuan masyarakat secara luas dan laku di pasaran, selain itu juga mengarahkan pada perubahan sikap penerima manfaat dari yang semula kurang percaya diri, rendah diri, mudah tersinggung, pemalu dan sulit bergaul yang akhirnya akan tumbuh percaya dirinya dan mampu hidup secara mandiri serta hidup bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam rangka penyaluran kerja dilaksanakan pertemuan bimbingan kesiapan keluarga untuk melaporkan prestasi dan testimoni yang telah mempunyai usaha dan pengalaman nyata serta perjuangan menuju sukses. Sebagai upaya memperoleh kesempatan kerja eks penerima manfaat telah dilaksanakan penyaluran kerja bekerja yang pelaksanaannya belum sepenuhnya mendatangkan manfaat bagi peserta pelatihan, karena hanya sebagian kecil, yaitu 26 orang atau 18,6% yang telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan (*open employment*) dan yang telah memulai usaha secara mandiri atau berwiraswasta (*self employment*) sebanyak 118 orang atau 81,94%

dari keterampilan kerja yang di peroleh selama satu tahun anggaran

Saran

Mencermati hasil penelitian tentang proses pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan vokasional, maka untuk meningkatkan pemberdayaan, perlu direkomendasikan sebagai berikut: Kepada lembaga, (a). Agar lebih fokus dalam proses pelaksanaan rekrutmen, maka perlu dilakukan pemetaan data secara komprehensif terlebih dahulu & penyebarluasan informasi lebih diintensifkan lagi sebelum melakukan pengenalan juga pendaftaran di daerah, sebagai akibatnya bisa dijangkau calon penerima manfaat yang lebih banyak lagi secara kuantitas.

Selain itu perlu menyempurnakan serta meningkatkan secara kuantitas dan kualitas baik melalui pendekatan langsung dengan datang ke pelosok daerah maupun tidak langsung atau secara online (telepon maupun internet) dan perlu menambah jangkauan sampai ke pelosok desa yang selama ini belum pernah diadakan aktivitas rekrutmen. (b). Selain itu agar lebih fokus dalam proses pelaksanaan assesmen dan dalam rangka untuk dapat melakukan evaluasi yang tepat sesuai dengan kondisi penerima manfaat maka petugas assesmen perlu memperoleh pelatihan khusus assesmen di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta di tahun 2020 mengingat masih ada petugas assesmen yang belum pernah memperoleh pelatihan assesmen, sehingga petugas assesmen diharapkan mampu bekerja secara lebih profesional lagi; (c). Proses pelaksanaan assesmen yang diselenggarakan secara sistematis telah berjalan dengan baik dengan menilai aspek fisiologis, psikologis, sosiologis dan vokasional, namun perlu didukung peralatan yang terstandar dan lengkap serta petugas baru menggunakan metode work sample apabila petugas tidak mampu mengungkapkan kapasitas penerima manfaat dan jika metode wawancara tes psikologi dan fisiologi sulit diterapkan. (d). Kegiatan pemberdayaan hendaknya tidak hanya ditujukan untuk peningkatan pengetahuan & keterampilan kerja semata, namun juga diarahkan dalam taraf lanjutan dan diarahkan pula pada perubahan sikap penerima manfaat yang dapat dihilangkan melalui konseling individu, kelompok maupun keluarga, karena hal ini dapat menghambat keberhasilan program pemberdayaan. (e). Dalam proses penyaluran perlu pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah yang terkait dan perusahaan swasta untuk memberikan dukungan terhadap rekrutmen calon penerima manfaat, dan pendampingan terhadap eks penerima

manfaat yang sudah kembali ke masyarakat yang usaha mandiri belum berkembang karena keterbatasan keterampilan, permodalan, pemasaran dan sebagainya agar mampu meningkatkan kualitas dan produktivitasnya serta mempersiapkan diri memperoleh kesempatan kerja yang diharapkan mampu bersaing dan menghasilkan produk yang berkualitas atau jasa yang mendapat pengakuan masyarakat secara luas dan laku di pasaran. Kepada petugas assesmen diharapkan dalam proses pelaksanaan assesmen mampu memahami dan menerapkan tahapan dan standar operasional prosedur serta pedoman pelaksanaan assesmen yang baku dan terstandar karena assesmen memiliki prinsip dasar partisipasi, yaitu situasi penerima manfaat baru dapat dilakukan secara lebih memadai hanya dengan keterlibatan dan kolaborasi aktif proses assesmen berlangsung dengan tim kerja yang baik dan kompak. Kepada Instruktur, diharapkan segera menyusun kurikulum pelatihan vokasional yang baru yang sesuai dengan tuntutan pasaran tenaga kerja sekarang ini agar mampu bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya serta mampu menyesuaikan dengan peralatan kerja yang lebih canggih dan modern. Selain itu kompetensi instruktur perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan kerja yang mengarah ke perubahan dari tingkat basic work skill training dan *intensive vocational training* ke pelatihan kerja yang lebih tinggi (*advance vocational training*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. (2003). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Asjari. (1995). *Ortopedagogik Anak Tuna Fisik*. Debdikbud.
- Dubois Brenda & Miley Carla Kongsrud. (n.d.). *Social Work And Powering Profession*. Alin & Bacon.
- Jim. Ife. (1995). *Creating Community Alternatives Vision Analysis And Practice*. Adison Wesley Longman Austria.
- Lawrence, N. W. (1997). *Social Research Method Qualitative, and Quantitative*. Third Edit, 19.
- Maxfield, F. (n.d.). *The Case Study* dalam Nazir M. Ghalia Indonesia.
- Moleong. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rusda Karya.
- Paton. (1987). *How To Use Qualitative Method In Evaluatin*. Sage Publication.
- Peter, & Colerige. (1997). *Pembevasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang*

cacat di Negara - Negara Beerkembang.
Oxfam & LP4C “Dria Manunggal” dengan
Pustaka Belajar.

Prof. Dr. Soeharso. (2016). *Laporan Kinerja*
BBRSBD.

Prof. Dr. Soeharso, (2016). *Laporan Perkembangan*
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas Daksa.

Prof. Dr. Soeharso, (2007). *Standar Pelayanan*
Rehabilitasi Sosial. 14–24.